

Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa

Wahjoe Pangestoeti
wpangestoeti@yahoo.com

(Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

Abstract:

The realization of local autonomy on local government autonomy has been implemented. The stages to attain development has been taken by district government. There are programs and decisions of district government that have been proposed to build district government and have to increase prosperity for the whole societies. The research aims at describing how are the Malang district efforts to motivate the rural apparatus and to know the factors that influence such efforts. The research is qualitative in nature. The procedures to collect data are observation, documentation and interview. Data analysis use interactive analysis model by Miles and Huberman. The result of the research shows that the efforts of empowering rural apparatus and the society is enough but the implementation of development sounds negative.

Key words: *Empowering, government, aparatur rural*

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 membawa angin segar dan perubahan besar dalam paradigma pemerintahan, dari sentralistis menjadi desentralistis. Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan bidang kewenangan yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai mana dikatakan Ishak (2001:1) bahwa: "Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak Januari 2001 seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara progresif telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia langkah-langkah dalam mengisi pembangunan era otonomi telah diambil oleh masing-masing pemerintahan kabupaten dan kota, dan jika dicermati terdapat keragaman bagaimana pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan program-program dan menetapkan kebijakan daerah, yang semuanya bertujuan untuk membangun

daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya".

Dalam upaya mencapai keberhasilan program pembangunan tersebut diperlukan dukungan yang memadai baik kelembagaan, tatalaksana, personil, administrasi, maupun sarana dan prasarana. Oleh karena itu sistem penyelenggaraan pemerintah negara mulai dari pusat sampai desa harus dioptimalkan dalam upaya pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan pemerintah. Untuk maksud tersebut menurut Wijayanto (2001: 1) perlu: "penyiapan aparatur negara yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyiapan sumber daya aparatur yang profesional dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan *conditio sine quanon*, terutama karena dengan otonomi daerah itu rakyat mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih tinggi kualitasnya, lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan

sosial ekonomi. Melalui optimalisasi fungsi-fungsi pemerintahannya itu, rakyat dapat berharap semakin luasnya rasa keadilan, semakin tingginya tingkat kemandirian mereka dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai masalah, serta semakin membaiknya tingkat kesejahteraan mereka”.

Kajian Teori

Kedudukan Pemerintahan Desa Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dalam Kerangka Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai salah satu organ pemerintahan yang langsung berada dibawah Camat. Hal itu terlihat dari definisi Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lingkungan pemerintahan desa terdapat dua badan yang terpisah, yaitu pemerintahan desa, merupakan Badan Eksekutif, terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, beserta Perangkat Desa lainnya, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang disebut sebagai Badan Legislatif. Kedua badan tersebut merupakan pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan desa otonomi.

Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa

Istilah “empowerment” berasal dari perkataan bahasa Inggris yang terjemahkan “Pemberdayaan” atau “pemampuan”. Dalam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua makna, yaitu: *to give power or authority* dan *to give ability to or to enable to*. Pengertian pertama bermakna memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan kepihak lain. Pengertian kedua bermakna sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Arif, Prijono dan Pranarka, 1996 : 25).

Menurut Cook, S dan Macaulay (1998 : 18)

pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu mempergunakan serta menggali kemampuan untuk meraih tujuan organisasi. Sedangkan menurut Carlan dalam Cook (1998: 16) pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide, tindakan dan keputusan-keputusannya.

Walaupun konsep yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda, namun pemberdayaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membangun daya dan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya.

Dari pengertian pemberdayaan diatas, dapat disimpulkan pemberdayaan dalam tulisan ini adalah suatu upaya untuk memampukan, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh segenap aparatur serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan pemberdayaan ini diharapkan segenap aparatur pemerintahan desa akan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang ada. Untuk mencapai harapan yang demikian maka pada saat ini nantinya dibutuhkan sumberdaya aparatur yang dinamis, proaktif, memiliki visi, inovatif, korektif, sadar teknologi, herkalaborasi dan peka terhadap perubahan dan tuntunan. Karena menurut Wahab (1998) dalam menjalankan roda pemerintahan, kemasyarakatan dan membangun pada umumnya, pemerintah dituntut untuk berbenah diri, mendinamisasikan dirinya menjadi sebuah pemerintahan yang efisien, disemangati oleh jiwa kewiraswastaan atau *entrepreneurial government*.

Pendidikan dan Latihan

Banyaknya para ahli yang mengemukakan berbagai definisi maupun batasan tentang pendidikan dan latihan, terutama para ahli

yang berkecimpung didalam ilmu administrasi atau manajemen (administrasi kepegawaian, manajemen kepegawaian maupun manajemen personalia, manajemen sumber daya manusia) yang pada dasarnya memberikan batasan yang tidak jauh berbeda.

Menurut Flippo (Hasibuan, 2001) mengemukakan, "*Education is concerned with incrising general knowledge and understanding of our total environment*" (Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh)." *Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employe for doing a particular job*" (Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu).

Selanjutnya Bella (Hasibuan, 2001) mengemukakan bahwa pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan ketrampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, di lakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasa menjawab *why*. Latihan berorientasi pada praktek, di lakukan di lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya menjawab *how*. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa sebagaimana diketahui bahwa secara umum pendidikan dan latihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada aparatur/perangkat pemerintahan desa dalam meningkatkan kecakapan dan ketrampilan, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan, pengawasan dan teknis yang sangat di perlukan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang diiringi pula dengan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan, maka Pemerintahan Kabupaten Malang telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar aparatur pemerintahan daerah maupun aparatur pemerintahan desa dapat melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi aparatur pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan desa antara lain: (1) Pelatihan operasional perangkat desa; (2) Pelatihan

teknis bagi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan (3) Pelatihan Pembekalan Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dengan demikian maka program pendidikan dan latihan tersebut diharapkan mampu: (1) memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kinerja; (2) Mempersiapkan aparatur atau Perangkat pemerintahan Desa untuk meghadapi pertanggung jawaban yang semakin meningkat dalam pemenuhan tuntutan Masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks dimasa yang akan datang; dan (3) Memepersiapkan Aparatur/perangkat pemerintahan desa yang siap dan tanggap dalam melaksanakan reorganisasi, perubahan misi dan inisiatif-inisiatif administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, yang berusaha menggambarkan fenomena-fenomena tertentu sesuai dengan realita dan bertujuan untuk memberikan pemaknaan terhadap penomena tertentu. Yakni ingin mengungkapkan atau menggambarka tentang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini berlokasi di Desa Landungsari Kec. Dau Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) *Informan*, adalah oarng dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan fokus penelitian, maka informan ditentuka secara *purposive* pada tahap awal dan dalam pengembangannya dilakukan *snowball*. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan awal adalah Kepala Desa Landungsari. Dari Kepada Desa selanjutnya peneliti menghubungi Sekretaris Desa, kegiatan selanjutnya disamping melakukan wawancara dengan beberapa perangkat desa, maka konsentrasi lebih diarahkan kepada upaya-upaya pemberdayaan aparatur dengan segala kendalanya sampai data yang diperoleh mengalami tingkat kejenuhan.

Aspek Penilaian Perilaku Aparatur Pemerintah

Pemahaman Terhadap Tugas

Pemahaman terhadap suatu tugas pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk perilaku seseorang. Jika aparatur desa tidak memahami tugasnya sebagai pelayan masyarakat maka dia akan bertindak bukan seperti yang diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti selama ini mereka yang tidak mengetahui tugasnya sebagai pelayan masyarakatnya akan cenderung bertindak sebagai penguasa. Jika dalam diri seseorang aparatur desa masih ada jiwa berkuasa maka tidak mungkin dia dapat menjalankan tugas pelayanan dengan memuaskan bagi mereka yang membutuhkan pelayanan.

Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa

Salah satu aspek yang mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas adalah kemampuan dari orang-orang yang ada dalam pemerintah desa tersebut. Konsep 'the right man on the right place' memang menjadi landasan penempatan aparatur pemerintah desa dalam pemerintahan desa. Hal ini dapat di mengerti mengingat aspek kemampuan dan keahlian belum sepenuhnya menjadi dasar rekrutmen dan promosi karir dalam pemerintah desa. Oleh karena itu sering kita menjumpai banyak aparat desa yang menempati jabatan atau bekerja tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Karena itu seorang aparatur desa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk belajar memahami apa yang menjadi tugas pokoknya sebagai aparatur desa. Pengalaman selama menjalankan tugas itulah yang menjadikan sumber pemahaman tentang tugas/pekerjaan seorang aparatur desa sehingga pada akhirnya dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini terjadi hampir pada semua level pemerintah desa, terutama pada level pemerintah desa pada tingkat bawah. Kemampuan seorang aparatur desa akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja dan pendidikan non formal yang diikuti seperti pelatihan, training, seminar dan sebagainya. Oleh karena itu jika pendidikan sudah cukup, pengalaman bekerja

juga sudah banyak dan sering mengikuti kegiatan pelatihan, training atau seminar maka akan memberikan pengaruh pada pelayanannya kepada masyarakat.

Pemberian Penghargaan

Sesuai dengan teori motivasi bahwa untuk meningkatkan semangat maka perlu diberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil melaksanakan pekerjaan dengan baik. Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan semangat kerja sehingga mereka akan bekerja dengan baik. Selain itu dengan diberikan penghargaan, mereka merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. *Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat*

Untuk mewujudkan kepuasan pelayanan masyarakat bukan merupakan hal yang mudah. Upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pada prinsipnya untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan menyebabkan harus bekerja keras dan memerlukan biaya yang tinggi. Untuk dapat memberikan kepuasan dalam pelayanan, maka salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan menyadari adanya kemungkinan ketidakpuasan dalam memberikan pelayanan.

Upaya Kepala Desa dalam Memberdayakan Aparatur Pemerintah Desa

Penyusunan Program Kerja

Dalam pemerintahan desa pembuatan program kerja sangat diperlukan karena program kerja merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta pendayagunaan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pemberian Pengarahan

Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu tugas tidak terlepas dari peran pimpinan dalam mengarahkan bawahan agar kesalahan dapat diminimalisir. Tujuan dari pemberian dukungan dan pemberian pengarahan kepada bawahan agar tercipta hubungan akrab antara

pimpinan dan bawahan dalam suasana kerja yang menyenangkan karena dengan terciptanya hal tersebut bawahan merasa pimpinan memberikan perhatian pada penyelesaian tugas mereka dan prestasi mereka sehingga akan menumbuhkan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik.

Melakukan Pengawasan

Proses manajemen dapat dikatakan lengkap jika pengawasan telah dilaksanakan seperti diketahui bahwa ada bermacam-macam fungsi manajemen dan diantaranya pengawasan menduduki posisi yang paling penting. Tujuan dari pengawasan untuk menilai apakah sasaran yang ditetapkan telah tercapai secara memuaskan atau tidak. Dalam pengawasan tidak hanya mencakup tindakan mengawasi namun juga mengoreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak hanya bersifat preventif yakni pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengawasan bersifat represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan.

Komunikasi antara Atasan dan Bawahan

Komunikasi merupakan cara seseorang untuk memberitahu dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain. Tujuan komunikasi adalah menyampaikan informasi, ide-ide tentang tujuan pemerintah desa. Dengan komunikasi yang baik akan tercipta hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga akan mempermudah dalam memberikan perhatian agar tercipta kerjasama dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas.

Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa

Konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Landungsari Kab. Malang adalah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Hal ini sejalan dengan pendapat Statanis (1999) yang dikutip Sudirman bahwa pemberdayaan dimaksud agar anggota tim terlibat dalam melaksanakan dan mengelola kinerja unitnya melalui perencanaan, pengendalian pengorganisasian ataupun penyempurnaan pekerjaan.

Sejalan dengan Statanis, Stewart A..M juga memberikan batasan bahwa pemberdayaan merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri sendiri dan dari staf kita untuk dituntut lebih sekedar pendelegasian agar kekuasaan ditempatkan secara tepat sehingga dapat digunakan secara efektif.

Pelatihan untuk aparatur perangkat desa telah dilakukan di Desa Landungsari dan dari segi materi mencakup kegiatan-kegiatan administrasi maupun operasional perangkat desa agar dapat melaksanakan fungsi pekerjaan secara efektif. Manfaat pelatihan secara administratif cukup mampu melaksanakan tugas sehari-hari, dari beberapa materi memang masih sulit seperti tentang pelatihan untuk bendaharawan desa dan kepala desa untuk bidang-bidang:

- Penggalian sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengelolaannya.
- Perencanaan pembangunan daerah.
- Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah materi-materi yang membutuhkan pelatihan lebih intensif.

Jadi pada dasarnya pelatihan dan pemberdayaan aparatur cukup membawa dampak yang positif, hanya masih perlu pemberdayaan dan pelatihan yang lebih intensif lagi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi atau Menghambat Upaya Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selalu dihadapkan pada beberapa factor sebagai penghambat. Demikian juga halnya dengan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa sebagai pelaksana terdepan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang mempengaruhi atau menghambat proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa

Kualitas sumber daya aparatur yang masih sangat rendah dan terbatas baik tingkat pendidikan maupun kemampuan dan pengalamannya juga sangat mempengaruhi dan

menjadi penghambat proses pemberdayaan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa yang mempunyai tingkat pendidikan yang kurang memadai akan mengalami kesulitan dalam proses pemberdayaan, sebab mereka mengalami hambatan dalam memahami materi pelatihan yang disampaikan dan demikian pula dalam prakteknya. Akhirnya ilmu yang diperoleh selama pelatihan tidak bisa diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh dan menghambat proses pemberdayaan aparatur pemerintah desa maupun dalam rangka pembinaan pemerintahan desa. Karena akan mempersulit berbagai aktivitas disebabkan ada keterbatasan dan ketergantungan yang tinggi dengan pihak pemerintah desa.

Dukungan Anggaran

Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa dapat dikatakan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut selalu dialokasikan tetapi jumlahnya masih belum memadai bila dibandingkan dengan kuantitas maupun kualitas aparatur pemerintah desa yang akan diberdayakan.

Untuk mewujudkan pelayanan prima, selain itu bagi lembaga publik dalam hal ini unit pemerintahan desa, sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diterbitkan Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1995 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Dalam keputusan Menpan ini dijelaskan sendiri pelayanan prima bagi masyarakat sebagai berikut:

- Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administrasi, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan atau bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan umum, rincian biaya/tariff pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum, keamanan dalam arti bahwa proses atau hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. Keterbukaan dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum waktu penyelesaian dan rincian biaya dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat, baik diminta maupun tidak. Efisien dalam arti persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi dengan produk pelayanan umum yang diberikan dan dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

Kualitas pelayanan yang ada pada saat ini harus dijaga agar tetap memnuhi harapan masyarakat bahkan untuk waktu mendatang harus ditingkatkan. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan prima ini maka diperlukan beberapa upaya yaitu:

- Meningkatkan kerjasama antara aparatur
- Meningkatkan koordinasi.
- Meningkatkan disiplin kerja

Penutup

Berdasarkan kajian terhadap data yang diperoleh serta analisis teoritis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan latihan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kab. Malang yaitu latihan operasional perangkat desa yang diikuti Kepala Desa dan perangkat desa, pelatihan

teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk bendaharawan desa dan kepala desa serta pelatihan penyelenggaraan BPD yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.

2. Proses pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan aparatur maupun pembinaan pemerintahan desa dihadapkan pada berbagai hambatan antara lain:
 - a. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang terbatas, berdampak pada penyerapan berbagai materi pelatihan mengalami hambatan dan demikian pula dalam implementasi di lapangan.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional pemerintah desa.
 - c. Dukungan anggaran terbatas, untuk tiga jenis pelatihan bagi pengembangan

sumber daya manusia aparatur pemerintah desa relatif belum memadai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan:

- a. Materi pelatihan hendaknya tepat manfaat dalam arti betul-betul latihan itu dibutuhkan masyarakat dan aparatur pemerintah desa.
- b. Anggaran pelatihan hendaknya di tambah dan berkesinambungan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diharapkan.
- c. Pihak-pihak yang terkait aparatur pemerintah desa lebih intensif melakukan pembinaan.
- d. Diperlukan pemberdayaan semua unsur yang ada di pedesaan sehingga tergalang kekuatan yang efektif membangun ekonomi baru.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1994. "Kebijakan Desentralisasi untuk Menjangkau Kaum Miskin". *Pelopop* 3(9).
- Bryant, Coralie dan L. G. White, 1982. *Managing Development in the third world*, Invesview Press, Boulder Colorado.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Cheema, G. S. dan D. A. Rondinelly (Editor). 1983. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publication.
- Cook, Sarah dan Macaulay Steve. 1998. *Perfect Empowerment: Pemberdayaan yang Tepat*. Jakarta: Eléx Media Komputiondo.
- deLeon, Linda. 1996. "Ethics and Entrepreneurship". *Policy Studies Journal* 24(3): 495-510.
- Efendi, Sofian. 1991. "Sistem Administrasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Pembangunan Berkelanjutan*. Editor: Samodra Wibawa. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gibson, Ivancevich, Danelly. 1995. *Organizaiton*. Penerjemah: Nunuk Adrianti. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Syarif. 2000. *Refleksi Realita Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Maryanti, Christina dkk. 2001. *Jaman Dgulat Rakyat*. Yogyakarta: Laperá Pustaka Utama.